

Upaya Guru dalam Meningkatkan Civic Knowledge Siswa Pada Mata Pelajaran PKn Di SMA Negeri 1 Langowan

Mia A. Alouw a, 1*, Apeles Lexi Lonto b, 2, Theodorus Pangalila c, 3

^{abc} Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Manado, Tondando, Indonesia

¹ miaalouw@gmail.com*; lexi.lonto@unima.ac.id; theopangalila@unima.ac.id

* miaalouw@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya guru dalam meningkatkan Civic Knowledge siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Penelitian ini menemukan bahwa guru telah berupaya untuk meningkatkan Civic Knowledge siswa sesuai dengan standar profesional yang telah ditentukan berdasarkan aspek-aspek pokok yang menjadi tolak ukur penting dalam meningkatkan Civic Knowledge (Pengetahuan Kewarganegaraan) siswa. Kriteria pokok pemilihan materi ajar PKn dikembangkan oleh guru melalui langkah-langkah yang sesuai dengan indikator yang ditentukan diantaranya adalah mengidentifikasi berbagai aspek yang terkandung dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai, mengidentifikasi jenis materi ajar yang merupakan implikasi dari keberagaman materi ajar meliputi ranah kognitif, afektif dan psikomotorik, menentukan sumber dan media pendukung terhadap keberhasilan penyampaian materi pembelajaran serta menyesuaikan materi ajar dengan kebutuhan, potensi dan perkembangan peserta didik. Adapun penelitian ini merekomendasikan penelitian lanjut tentang strategi yang diterapkan guru dalam proses pembelajaran PKn.

Kata Kunci: Upaya, Guru, Civic Knowledge, Pembelajaran PKn.

Abstract

The purpose of this study was to determine how the teacher's efforts to improve student Civic Knowledge. This study uses a qualitative approach with data collection using interview techniques, observation and documentation study. This study found that teachers have made efforts to improve students' Civic Knowledge in accordance with predetermined professional standards based on the main aspects which are important benchmarks in increasing student Civic Knowledge. The main criteria for selecting Civics teaching materials are developed by teachers through steps that are in accordance with the determined indicators, including identifying various aspects contained in the competency standards and basic competencies that must be achieved, identifying the types of teaching materials which are implications of the diversity of teaching materials covering the cognitive domain, affective and psychomotor, determining sources and supporting media for the successful delivery of learning materials and adapting teaching materials to the needs, potentials and development of students. This research recommends further research on the strategies applied by the teacher in the Civics learning process of nationalism is needed to increase student interest and learning outcomes in Civics subjects.

Keywords: Effort, Teacher, Civic Knowledge, Civics Learning.

PENDAHULUAN

Untuk mencapai manusia yang seutuhnya serta mampu berinteraksi dengan lingkungan sebagai individu maka perlu dilakukan melalui proses pendidikan (Pengajaran, Bimbingan dan Latihan) dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan dan kepribadian setiap individu. Proses pendidikan ini bisa diwujudkan nyata melalui suatu tindakan dan perbuatan yang telah terencana, dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran, karena setiap manusia memiliki kemampuan dasar atau potensi untuk dididik dan mendidik, juga memiliki kepribadian yang menyangkut sikap, bakat, minat, nilai-nilai yang sudah ada pada diri setiap orang (Yessy Nur Endah Sary, 2015:3).

Selain itu dalam lingkungan pendidikan harus ada interaksi yang baik antara pendidik dan peserta didik sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. Karena tujuan dari pendidikan adalah semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang dicapai melalui pengajaran. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa: "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang di butuhkan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara".

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 juga menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk merealisasikan fungsi dan tujuan pendidikan tersebut di atas, maka seperti dalam pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa: jalur pendidikan itu terdiri atas pendidikan formal dan nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi bahkan memperkaya satu sama lain.

Jalur pendidikan formal yang berlangsung disekolah terdapat berbagai macam pelajaran yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelajaran-pelajaran tersebut berperan penting dalam membentuk dan membina moral, akhlak dan karakter siswa sehingga menjadi siswa yang berkarakter dan pengetahuan.

Dari berbagai pelajaran yang ada pada pendidikan formal, mata pelajaran PKn merupakan mata pelajaran yang sangat mendasar karena orientasi mata pelajaran ini terletak pada pembentukan, pembinaan bahkan penguatannya moral, akhlak, dan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penguatan pengetahuan warga negara (Civic Knowledge) merupakan tugas dari guru mata pelajaran PKn dengan cara menumbuhkan kembali pengetahuan yang terkandung dalam ideologi Pancasila. Oleh sebab itu guru PKn mempunyai peran yang sangat vital dalam meningkatkan pengetahuan siswa sebagai warga negara disamping siswa dari segi karakter (Disposition) dan ketrampilan (Skills).

Sehubungan dengan hal tersebut maka, guru PKn amat sangat dibutuhkan agar dapat menciptakan proses belajar dan mengajar yang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan dari PKn serta bisa menggunakan berbagai macam pendekatan dalam pembelajaran PKn untuk tercapainya tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri.

Namun demikian sehubungan dengan perkembangan dan kemajuan yang terjadi serta pendekatan dalam proses pembelajaran PKn, sebaiknya pembelajaran PKn dilaksanakan dengan cara yang tidak hanya memfokuskan pada karakternya saja, melainkan juga pada penguatan pengetahuan dan pemberian ketrampilan bagi siswa, sehingga sangat di harapkan antara perilaku siswa dan tujuan PKn ada keselarasan serta bisa diandalkan sehingga mampu berpartisipasi dan berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Sebagai bagian dari pengaplikasian hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang memiliki kecerdasan, keterampilan dan berkarakter sebagaimana yang di amanatkan oleh Pancasila dan Undang-undang 1945.

Untuk melaksanakan proses belajar seperti yang di atas sangat di haruskan guru PKn memiliki kemampuan, pengetahuan, dan ketrampilan untuk mengimplementasikan berbagai pendekatan dalam pembelajaran PKn. Sehingga seorang guru PKn harus setiap saat mengembangkan dan meningkatkan kompetensi profesional dan pedagogiknya dalam bidang Pendidikan Kewarganegaraan.

Berkenaan dengan hal tersebut sebagaimana di lakukan pengamatan awal di SMA Negeri 1 Langowan masih terlihat bahwa guru PKn dalam proses pembelajaran hanya menitikberatkan pada pemberian materi yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan siswa, contohnya guru lebih sering menyuruh siswa untuk mencatat, mengerjakan tugas-tugas, dan metode-metode guru yang kurang menarik minta siswa untuk belajar PKn. Sehingga belum terlihat upaya guru dalam meningkatkan civic knowledge (pengetahuan kewarganegaraan) siswa, padahal menurut Winarno (2014:52). Seorang guru PKn harus memiliki pemahaman mengenai bagian inti dalam Pendidikan Kewarganegaraan yang berisi pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), watak dan kewarganegaraan (civic disposition) dan ketrampilan kewarganegaraan (civic skills).

Berdasarkan temuan masalah di atas maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Upaya Guru Dalam Meningkatkan Civic Knowledge Siswa Pada Mata Pelajaran PKn Di Sma Negeri 1 Langowan”.

KAJIAN PUSTAKA

Upaya

Kata upaya sering diartikan sebagai usaha, ikhtiar dengan kata lain upaya merupakan cara untuk mencapai sesuatu maksud, memecahkan permasalahan, serta jalan keluarlah yang menjadi tujuannya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008:626).

Sesuatu akan berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan fungsi, maksud, dan tujuan apabila ada hal yang dilakukan yang sifatnya mengusahakan. Hal ini tentunya akan terjadi apabila upaya yang dilakukan ditunjang dengan sarana prasarana yang dapat mendukung setiap kegiatan, selain itu perlu juga menggunakan berbagai metode, cara dan alat penunjang yang lain. (<http://sip-belajar.blogspot.co.id/2013/02/upaya.html> yang diakses Selasa, 5 September 2017).

Dari beberapa pengertian di atas maka upaya yang penulis maksudkan adalah berbagai cara yang dilakukan dan di tunjang oleh berbagai sarana prasarana pendukung untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Guru

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Balai Pustaka menjelaskan bahawa guru adalah “Orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar”.

Lain halnya dengan pendapat Djamarah yang mengemukakan pengertian “Guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membina anak didik, baik secara individual maupun klasikal di sekolah dan di luar sekolah”. Djamarah (2002:32) yang dikutip oleh Laksono (2011:1). Berbeda apa yang di kemukakan oleh Djamarah dan Aswan (2010:12), “Guru adalah tenaga pendidik yang memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada anak didik di sekolah”.

Sedangkan pada BAB 1 mengenai Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dijelaskan bahwa “Guru adalah pendidik yang profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah”.

Dari pendapat-pendapat di atas, maka pengertian guru dalam penelitian ini adalah seseorang yang memiliki tugas sebagai pengajar, pelatih, pendidik dan pembimbing bagi seluruh peserta didik yang berlokasi di sekolah.

Upaya Guru

Menjadikan siswa yang disiplin tidaklah mudah dan gampang. Namun merupakan sebuah tantangan yang memiliki kesulitan tersendiri. Oleh karena itu harus ada usaha yang ekstra dari guru baik dalam proses pembelajaran dikelas maupun diluar kelas (Hasbullah, 2006:121).

Sedangkan menurut Rosmiati (2010:17), “untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan maka guru harus berupaya melakukan berbagai kegiatan yang bisa mendorong tercapainya tujuan pembelajarana misalnya melaksanakan kegiatan pembelajaran yang aktif, kreatif dan menyenangkan.

Upaya guru yang dimaksudkan dalam penelitian ini sesuai dengan pengertian diatas adalah setiap usaha yang dilakukan oleh seorang tenaga pendidik atau guru kepada seluruh siswa disekolah demi mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh guru bahkan tujuan pendidikan yang ditetapkan melalui kurikulum sekolah.

Kompetensi Guru

Sudjana (2002:17-19) menjelaskan bahwa terdapat tiga bidang pengelompokan kompetensi guru, yaitu kompetensi pedagogic, personal, dan sosial. Kemampuan intelektual guru yang meliputi penguasaan materi pelajaran, menguasai berbagai keterampilan mengajar, memiliki pengetahuan mengenai belajar dan tingkah laku individu, mengetahui cara memberikan bimbingan dan penyuluhan, berkemampuan mengelola administrasi kelas, tahu cara memberi penilaian terhadap hasil belajar siswa juga memiliki banyak pengetahuan kemasyarakatan dan pengetahuan mengenai hal-hal umum lainnya semua ini merupakan bidang kompetensi pedagogic yang wajib dimiliki oleh semua guru.

Selanjutnya seorang guru yang professional harus memiliki juga beberapa keahlian seperti, siap sedia dalam menghadapi berbagai hal yang berkaitan dengan tugas dan profesinya, selalu menghargai pekerjaannya, memiliki kecintaan dan mata pelajaran yang dibinanya diajarkan kepada murid dengan penuh tanggung jawab, selalu bersikap toleran terhadap sesama teman profesinya dan kepada semua orang, serta rela bekerja keras demi meningkatkan kualitas pekerjaannya. Ketika semua hal ini diaplikasikan guru di sekolah maka bisa dikatakan guru tersebut telah memiliki kompetensi personal yang baik.

Seorang guru selain memiliki kompetensi pedagogic dan personal juga harus mempunyai kompetensi sosial yang bertumpu pada berbagai keterampilan/berperilaku seperti terampil dalam mengajar di dalam kelas, memberikan bimbingan belajar kepada siswa, memberi penilaian atas hasil belajar siswa, juga terampil dalam menggunakan berbagai alat bantu pembelajaran, memiliki kepribadian yang mudah bergaul atau mudah membangun komunikasi dengan siswa, serta memiliki kejelian untuk melihat situasi pembelajaran yang akan berdampak pada tumbuhnya semangat belajar siswa.

Profesi menurut Murniati (2007:2) mempunyai ciri yang sangat mendasar yaitu memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh suatu instansi atau badan yang berwenang dan memiliki kecakapan dan keahlian yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Ketika pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai dipadukan dalam sebuah bentuk kesatuan dengan segala pola pikir dan pola tindak yang sudah teratur secara sistematis dan terarah serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Maka dengan sendirinya masyarakat akan mengakui kompetensi yang dimiliki seseorang dalam hal ini adalah seorang guru. Sehingga seorang guru tersebut layak disebut sebagai orang yang berkompeten karena telah memenuhi berbagai syarat yang telah dijelaskan sebelumnya.

Sementara itu kompetensi guru juga sudah diatur secara jelas oleh pemerintah melalui sebuah regulasi yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang menyebutkan bahwa seorang guru harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial (Depdiknas, 2005:24, 90 – 91).

1. Kompetensi pedagogik dibutuhkan setiap guru untuk mengelola pembelajaran agar peserta didik memahami setiap pelajaran yang diberikan dan menjadikan peserta didik lebih dialogis. Substansi dari kompetensi pedagogik meliputi kemampuan guru dalam memahami kondisi peserta didik, merancang dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar, mengevaluasi hasil belajar siswa, dan guru mampu mengembangkan setiap potensi yang dimiliki peserta didik.
2. Sebagai manusia yang berkepribadian yang mantap, memiliki kearifan, kedewasaan, dan memiliki wibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didik lainnya, dan berakhlak mulia. Demikian pula dengan guru harus benar-benar mencerminkan hal-hal diatas sehingga bisa disebut sebagai guru yang mempunyai kompetensi kepribadian yang baik.
3. Kompetensi profesional harus dimiliki setiap guru dalam meningkatkan profesionalitasnya karena kompetensi ini menekankan bahwa seorang guru harus menguasai materi pembelajaran bidang studi secara luas dan mendalam, artinya guru harus menguasai substansi isi materi dalam kurikulum mata pelajaran di sekolah serta hal-hal inti dari bidang keilmuan yang terdapat dalam kurikulum tersebut, agar wawasan keilmuan guru semakin bertambah.
4. Guru merupakan bagian dari masyarakat karena hidup ditengah lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu seorang guru harus bisa berinteraksi, bergaul dan berkomunikasi dengan efektif kepada seluruh elemen masyarakat seperti pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan seluruh *stakeholders* pendidikan yang ada dimasyarakat terlebih khusus dengan orang tua siswa.

Civic Knowledge

Komponen utama pendidikan kewarganegaraan yang perlu diajarkan kepada peserta didik mencakup tiga kompetensi kewarganegaraan yaitu pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), ketrampilan/kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*), sikap atau watak (*civic disposition*). Branson, 1998).

Selain itu (Yulaiwati, 2004) memberikan penjelasan bahwa ketiga domain ini memiliki kaitan erat dengan model taksonomi bloom, yaitu menjadi domain kognitif, afektif, dan psikomotor

Civic knowledge bisa di seajarkan dengan ranah kognitif, (civic skills) bisa dikaitkan dengan ranah psikomotor, sedangkan (civic disposition) bisa dihubungkan dengan ranah afektif. Winarno juga menjelaskan bahwa Civic Knowledge berisi tentang hal-hal yang layak harus diketahui dan dipahami oleh setiap warga negara. Selanjutnya National center for learning and citizenship yang dikutip oleh (Winarno, 2012:107) menjelaskan bahwa isi civic knowledge sebagai pertanyaan yang berhubungan dengan sejarah dan pengetahuan kontemporer, yang nantinya akan mengarah pada warga negara yang mampu memahami system pemerintahan yang dianut secara konstitusional serta alasan-alasan mendasar yang melandasinya.

Isi Civic Knowledge Di Sekolah

Dalam buku pedoman khusus pengembangann silabus dan penilaian mata pelajaran kewarganegaraan yang di keluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (2004) mengemukakan bahwa mata pelajaran kewarganegaraan terdiri dari beberapa domain yang saling terkait satu sama lain, yaitu pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge) ketrampilan kewarganegaraan (civic skills) dan nilai-nilai kewarganegaraan (civic values). Politik, Hukum dan Moral yang kemudian dijabaarkan menjadi pengetahuan akan prinsip-prinsip dan proses demokrasi, tugas lembaga negara dan lembaga non pemerintah, memahami identitas nasional, mengetahui pemerintahan yang berdasarkan hukum, kekuasaan peradilan yang tidak memihak, mengetahui sejarah bangsa, serta memahami berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua ini merupakan konten dari pengetahuan kewarganegaraan sebagai salah satu domain dalam mata pelajaran PKn di sekolah.

Sebelumnya, pengetahuann kewarganegaraan yang hendak di kembangkan sebagai isi bidang PKn untuk menggantikan pelajaran PPKn kurikulum 1994 telah mengalami beberapa kali perubahan dan penyempurnaan. Ruang lingkup tersebut bermula dari pengembangan isi PKn yang dilakukan oleh Pusat Kurikulum (Puskur) Tahun 2004.

Pendidikan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran baru menggantikan kewarganegaraan 2004 juga mengalami beberapa inovasi yang kemudian diterjemahkan dala sebuah peraturan menteri pendidikan nasional No. 22 Tahun 2006 yang secara secara tidak langsung menjelaskan bahwa terdapat delapan kajian inti dalam pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge, yaitu warga negara yang bisa memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, menataati norma, hukum, dan peraturan, menghormati sesama warga negara yang memiliki hak asasi, menjadi warga negara yang bisa memenuhi kebutuhan dasar hidup, bisa memahami konstitusi sebagai warga negara, terlibat aktif dalam pelaksanaan demokrasi dan proses politik, memiliki jiwa yang pancasilais, dan mampu bersaing di era globalisasi.

Konsep Pendidikan Kewarganegaraan

Dalam kurikulum sekolah terdapat satu mata pelajaran yang bernama Pendidikan Kewarganegaraan. Ada hal yang menarik dari mata pelajaran PKn ini yaitu berbeda dengan mata pelajaran lainnya yang hanya focus pada peningkatan pengetahuan saja. Sementara Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai tugas yang mulia tapi cukup berat yaitu berupaya membina moral dan karakter dari peserta didik untuk menjadi warga negara yang pancasilais. Hal ini bertujuan untuk tercapainya perkembangan yang optimal dalam diri peserta didik yang bisa menjadi bekalnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. (Daryono dkk, 2011:1).

Selain tujuan PKn yang dibahas diatas masih ada pula bagian penting dan mata pelajaran PKn yaitu memupuk rasa kecintaan terhadap bangsa dan tanah air kedalam jiwa peserta didik. Oleh karena itu substansi dari PKn adalah merupakan sebuah wahana untuk menjadikan warga negara yang memiliki kecintaan terhadap bangsa dan negara, mencerdaskan seluruh warga negara sehingga akan terbentuk sebuah watak peradaban bangsa yang bermartabat yang bermuara pada terciptanya warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Busrizalti, 2013:8).

Semua uraian diatas menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan sebuah mata pelajaran yang berusaha membina moral dan ahklak peserta didik untuk menjadi warga negara yang baik dan cerdas serta memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila, sehingga peserta didik akan mampu menghadapi setiap perubahan di masyarakat, bangsa dan negara.

Tujuan PKn

Dengan adanya mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, warga negara diharapkan mampu “memahami, menganalisi, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan

negaranya secara berkesinambungan dan konsissten dengan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonsia 1945". (Sumarsono, 2001:7). Sementara itu menurut Djahiri dalam Busrizalti (2013:5) tujuann pendidikan kewarganegaraan adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan kewarganegaraan secara umum harus mendukung keberhasilan pencapaian pendidikan nasional, yaitu: "mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengembangkan manusia indonesia seutuhnya. Yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan memiliki kesehatan jasmani dan rohani, kepribadiann mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
- b. Tujuan khusus pendidikan kewarganegaraan yaitu: warga negara mempunyai moral yang terbina sebagai orang-orang yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga mampu hidup berdampingan dalam masyarakat yang majemuk dari suku, ras dan agama, menjadi warga negara yang senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan dan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan, serta selalu berusaha bersikap adil kepada sesama warga negara.

Selain itu PKn juga bertujuan mendidik warga negara untuk menjadi warga negara yang berjiwa patriotic, toleran terhadap sesama masyarakat yang penuh kemajemukan, menanamkan kesetian terhadap bangsa dan negara, mengedukasi warga negara untuk saling menghormati antar umat beragama , menjadikan warga negara yang semokratis dan berjiwa pacasila yang sejati. (Somantri dalam Busrizalti, 2013:6)

Secara umum semua pendapat di atas memiliki kesamaan pandangan mengenai tujuan PKn, yaitu, lewat pembelajaran PKn diharapkan akan terbentuk karakter yang baik dari seluruh warga negara, bertanggungjawab, berbudi pekerti, luhur, serta warga negara yang menghormati dan mencintai tanah air, bangsa dan negara.

Karakteristik PKn

Karakteristik bisa diartika sebagai suatu ciri atau tanda yang menunjukkan perbedaan dengan yang lain. Demikian halnya dengan Pendidikan Kewarganegaraan yang memiliki karakteristik berbeda dengan mata pelajaran yang lain. Perbedaan karakteristik ini bisa kita lihat dari berbagai aspek mulai dari lingkup materinya, strategi pembelajaran sampai pada sasaran akhir pendidikan ini.

Adapun karakteristik PKn adalah:

1. PKn merupakan rumpun dari ilmu pengetahuan sosial;
2. Mulai dari pendidikan dasar sampai pada pendidikan tinggi PKn merupakan Mta pelajran dan Mata Kuliah wajib di ajarkan. Sebagai kelompok mata kuliah wajib umum
3. PKn tidak semata-mata mengajarkan tentang pengetahuan saja melainkan juga menanamkan nilai-nilai dalam diri peserta didik sebagai bagian dari warga negara.
4. Ruang lingkup pembelajaran PKn yang sangat luas dan mendasar.
5. Tujuan dan sasaran akhir dari PKn yaitu, membangun waak atau karakter warga negara serta memberdayakan warga negara.
6. Kajian PKn diterima sebagai sebuah wahana daan proses pendidikan menuju masyarakat yang demokratis;
7. Terdapat tiga pusat yang menjadi elemen-elemen terpenting dalam pembelajaran PKn, yaitu *civic knowledge, civic disposition, civic skills*.
8. Karena perubahan yang terjadi secara dinamis maka pendekatan yang paling relevan dalam pembelajaran PKn menggunakan pendekatan belajar kontekstual CTL (*Contextual Teaching and Learning*) sehingga akan menggali wawasan dan pemahaman setiap warga negara terhadap situasi dan kondisi yang terjadi.
9. PKn mengenal satu metode pembelajaran, yaitu VCL (*Value Clarification Technique*) Teknik Pengungkapan Nilai yang tujuannya membina untuk mengeksplor setiap nilai dalam pembelajaran sehingga bisa dipraktekan dalam kehidupan sehari-hari.(aspek afektif). (<http://googleweblight.com/> yang diakses tanggal 2 Oktober 2017)..

METODE PENELITIAN

Metode Dan Alasan Menggunakan Metode

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif kualitatif yang merupakan suatu prosedur penelitian yang mengembangkan fakta-fakta atas masalah-masalah yang diteliti serta data yang diperoleh, dikumpulkan, dianalisis, dan dijelaskan. Arikunto (2002: 107).

Alasan penggunaan metode penelitian ini adalah karena adanya relevansi antara permasalahan yang akan di teliti dengan metode yang digunakan yaitu peneliti akan mencari fakta-fakta dan data yang mendukung dalam penulisan skripsi.

Tempat Dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini bertempat di sekolah menengah atas Negeri 1 Langowan Kabupaten Minahasa.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah selama 3 bulan yaitu mulai bulan april sampai juli 2018.

Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, di mana peneliti yang akan turun langsung ke lokasi penelitian dan di bantu dengan instrument pengumpulan informasi yang diperlukan sesuai dengan teknik pengumpulan data yang di tetapkan (Sugiono, 2014:400).

Sumber Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber yaitu guru PKn dan siswa SMA Negeri 1 Langowan, Kabupaten Minahasa.

Teknik Pengumpulan Data

Data sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian ini. Untuk membantu mengumpulkan data maka peneliti menggunakan beberapa teknik yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan cara mengumpulkan data yang dilakukan peneliti dengan cara mengamati objek dan melakukan pencatatan secara sistematis baik situasi penelitian yang di atur atau dibuat seperti dalam laboratorium maupun situasi penelitian alamiah yang terjadi dilapangan (Abdurahman, 2011:38).

Selanjutnya menurut Nasution yang dikutip oleh Sugiono (2010:64), “observasi merupakan dasar semua ilmu pengetahuan. Dalam observasi melibatkan dua komponen, yaitu pelaku observasi yang dikenal dengan observer dan obyek yang dikenal sebagai observasi”.

2. Wawancara

Teknik wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab baik secara langsung maupun tidak langsung secara bertatap muka dengan sumber data” Abdurahman (2011:40-42). Sedangkan menurut Esterberg yang dikutip oleh Sugiyono (2010:72), “wawancara merupakan proses pertukaran informasi dan ide yang dilakukan oleh dua orang sehingga terjadi proses tanya jawab yang terfokus pada pembahasan satu pokok permasalahan.

3. Dokumentasi

Menurut Hidayat (2007:88), “dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen asli” misalnya mengambil gambar saat wawancara, membuat daftar table dan membuat catatan lapangan.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh peneliti di lapangan pada penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Miles dan Huberman dalam sugiono (2013:252), mengemukakan bahwa sebelum data sudah jenuh maka kegiatan dalam menganalisa data secara kualitatif akan terus berlangsung terus menerus. Berikut ini beberapa prosedur analisis data pada pendekatan kualitatif yaitu:

1. Data Reduction (Reduksi data)

Dalam tahapan reduksi data akan dirangkum kemudian hanya dipilih hal-hal yang pokok saja serta hanya difokuskan pada hal yang penting, selanjutnya menentukan tema dan pola. Manfaat dari reduksi data ini ialah peneliti akan memperoleh gambaran yang jelas mengenai apa data yang akan dibutuhkan selanjutnya dan bagaimana cara memperolehnya. (Sugiono, 2013:247)

2. Data Display (Penyajian data)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan membuat uraian singkat dan bagan yang menggambarkan hubungan antar indicator. Tujuannya adalah akan lebih mudah melihat hubungan antar indicator dan lebih cepat dipahami. Miles dan Huberman (1984) tahapan penyajian data paling sering dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. (Sugiono, 2013:249)

3. Conclusion Drawing / Verification

Dalam penelitian kualitatif verifikasi kesimpulan masih merupakan temuan yang baru. Verifikasi kesimpulan sangat perlu dilakukan agar temuan atau gambaran objek yang sebelumnya belum pernah ada. Atau masih remang-remang setelah diteliti menjadi jelas, sehingga hasilnya akan muncul seperti pola hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. (Sugiono, 2013:252-253)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi di sekolah, melakukan wawancara dengan guru matapelajaran PKn dan siswa di SMA Negeri 1 Langowan sebagai sumber data dalam penelitian ini. Penelitian ini melakukan pengumpulan data lapangan sesuai indikator yang diteliti yakni indikator upaya guru dan indikator civic knowledge siswa.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap sumber data yaitu guru mata pelajaran PKn di SMA Negeri 1 Langowan dan Siswa-siswi di sekolah tersebut. Analisisnya disesuaikan dengan indikator yang diteliti, yaitu :

1. Indikator Upaya guru.

Analisis data yang dilakukan melalui wawancara kepada informan yakni Guru PKn. Dalam penelitian ini menggunakan pedoman wawancara yang terdiri dari beberapa pertanyaan :

1. Sejauh mana bapak memahami civic knowledge atau pemahaman tentang kewarganegaraan ?
Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan pada guru PKn diperoleh jawaban sebagai berikut :
Informan Drs. Herie Pajow : pemahaman kewarganegaraan terdiri dari pengetahuan, kemampuan atau skill dan kepribadian sebagai warga negara. (wawancara 20 Juni 2018)
2. Sebagai guru PKn hal apa yang akan bapak lakukan untuk meningkatkan civic knowledge pada siswa ?
Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan pada guru PKn diperoleh jawaban sebagai berikut :
Informan Drs. Herie Pajow : untuk meningkatkan civic knowledge pada siswa yaitu menggunakan segala model pembelajaran untuk mempermudah siswa mengakses pengetahuan kewarganegaraan. (wawancara 20 Juni 2018)
3. Apakah bapak selalu menggunakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dalam melaksanakan pembelajaran ?
Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan pada guru PKn diperoleh jawaban sebagai berikut :
Informan Drs. Herie Pajow : Ya harus, karena itulah yang menjadi pedoman guru dalam melaksanakan kegiatan di kelas. Dengan menggunakan RPP guru lebih mudah mengatur waktu sehingga pembelajaran berjalan dengan baik karena semua telah di atur dalam RPP. (wawancara 20 Juni 2018)
4. Apakah tujuan pembelajaran yang bapak muat dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mengandung nilai-nilai civic knowledge ?
Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan pada guru PKn diperoleh jawaban sebagai berikut :
Informan Drs. Herie Pajow : Ya karena yang dicantumkan dalam RPP memiliki tiga ranah yaitu afektif, pengetahuan, dan keterampilan. Dengan mencantumkan tiga ranah tersebut maka siswa bukan hanya memiliki pengetahuan tentang kewarganegaraan tetapi memiliki skill atau kemampuan serta memiliki kepribadian yang baik. (wawancara 20 Juni 2018)
5. Apakah dalam proses pembelajaran bapak memberikan pemahaman kepada siswa tentang pentingnya civic knowledge ?
Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan pada guru PKn diperoleh jawaban sebagai berikut :
Informan Drs. Herie Pajow: ya karena dia merupakan bagian yang tidak terpisahkan antara kesadaran sebagai warga negara keterampilan dan pengetahuan. (wawancara 20 Juni 2018)

Dari beberapa jawaban yang di sampaikan oleh guru PKn di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa Guru Di SMA Negeri 1 Langowan sudah berupaya nelaksanakan tugasnya dengan baik. Di mana Guru PKn dalam melaksanakan pembelajaran selalu menggunakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), selanjutnya guru PKn juga selalu memberikan pemahaman kewarganegaraan kepada siswa agar menjadi warga negara yang baik.

2. Indikator Civic Knowledge Siswa

Wawancara yang dilakukan kepada informan yakni siswa yang ada di SMA Negeri 1 Langowan, peneliti memperoleh jawaban sebagai hasil pengumpulan data. Selanjutnya wawancara dilakukan berdasarkan pedoman yang terdiri dari indikator yang diteliti beberapa pertanyaan, yakni :

- **civic knowledge siswa**

1. Apakah anda selalu mentaati setiap aturan di sekolah ini ?

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa siswa di SMA Negeri 1 Langowan diperoleh jawaban sebagai berikut:

Jawaban dari siswa inisial (M.R) : Ya, karena peraturan sekolah harus di taati agar tidak mendapat sanksi dan tidak dimarahi guru. (wawancara 20 Juni 2018)

Jawaban dari siswa inisial (K.O) : Ya, aturan sekolah selalu saya taati terlebih saat jam mata pelajaran, saya tidak pernah bolos dan saya selalu membuat tugas yang diberikan oleh guru. (wawancara 20 Juni 2018)

Jawaban dari siswa inisial (C.M) : Ya, karena setiap peraturan sekolah itu wajib untuk di taati karena kalau tidak bisa dimarahi guru juga di beri sanksi dan terkadang dikurangi nilai. (wawancara 20 Juni 2018)

Jawaban dari siswa inisial (A.M) : Ya, sebagai siswa itu sudah seharusnya karena juga saya memiliki jabatan osis itu saya sudah lakukan setiap kali. (wawancara 20 Juni 2018)

Jawaban dari siswa inisial (V.K) : Tidak, karena lain kali kalau saya sudah tidak tahan di jam-jam terakhir pelajaran saya pulang lebih awal. (wawancara 20 Juni 2018)

Jawaban dari siswa inisial (E.M) : Ya selalu saya taati agar nilai terjamin dan membuktikan kalau saya ini orang baik. (wawancara 20 Juni 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa siswa di SMA Negeri 1 Langowan hanya sebagian kecil siswa yang tidak mentaati aturan di sekolah tersebut contohnya masih ada siswa yang pulang sebelum waktunya.

2. Apa yang anda akan lakukan agar menjadi warga negara yang baik ?

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa siswa di SMA Negeri 1 Langowan diperoleh jawaban sebagai berikut:

Jawaban dari siswa inisial M.R : yang pertama agar menjadi warga negara yang baik harus bersikap baik kepada orang lain, menghargai orang lain dan mematuhi semua peraturan yang berlaku. (wawancara 20 Juni 2018)

Jawaban dari siswa inisial K.O : untuk menjadi warga negara yang baik yaitu perlu mentaati aturan negara yang diberikan oleh pemerintah kepada warga negara agar supaya kelangsungan negara bisa berjalan dengan baik dengan adanya perintah yang diberikan oleh pemerintah. (wawancara 20 Juni 2018)

Jawaban dari siswa inisial C.M : agar menjadi warga negara yang baik yaitu mentaati setiap peraturan yang ada dan saling bertoleransi dengan sesama warga negara. (wawancara 20 Juni 2018)

Jawaban dari siswa inisial A.M : menjadi warga negara yang baik pertama itu saling menghormati antar sesama walaupun disekolah kalau ada agama islam kita menghormati jika mereka berpuasa dan sebagai siswa yang utama itu kita belajar giat untuk membangun negara kita ini. (wawancara 20 Juni 2018)

Jawaban dari siswa inisial V.K : agar menjadi warga negara yang baik berusaha untuk menaati peraturan-peraturan yang ada. (wawancara 20 Juni 2018)

Jawaban dari siswa inisial E.M : menjadi warga negara yang baik kita perlu mentaati setiap peraturan yang ada dan ikut melaksanakan ketertiban sosial dan hal-hal yang lainnya dan juga turut serta dalam melaksanakan tugas bela negara. (wawancara 20 Juni 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai cara menjadi warga negara yang baik ternyata siswa di SMA Negeri 1 Langowan sudah mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan menjadi warga negara yang baik seperti mentaati setiap aturan yang berlaku.

3. Apa yang anda ketahui tentang identitas nasional ?

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa siswa di SMA Negeri 1 Langowan diperoleh jawaban sebagai berikut:

Jawaban dari siswa inisial M.R : Identitas nasional yang saya ketahui adalah identitas seorang warga negara yang tinggal di suatu wilayah yang diaduduki. (wawancara 20 Juni 2018)

Jawaban dari siswa inisial K.O : identitas nasional yang saya ketahui ialah identitas yang di dalamnya terdapat warga negara, pemerintah yang mengatur dalam negara, penduduk dan wilayah. (wawancara 20 Juni 2018)

Jawaban dari siswa inisial C.M : identitas nasional adalah tentang tentang suatu negara yang terdiri atas pemerintah, warga negara, dan sekitarnya. (wawancara 20 Juni 2018)

Jawabana dari siswa inisial A.M : identitas nasional itu adalah suatu yang terdapat dalam suatu negara itu seperti penduduk, wilayah dan juga sebuah pemimpin dalam negara itu. (wawancara 20 Juni 2018)

Jawaban dari siswa inisial V.K : identitas negara adalah suatu negara yang terdiri atas warga negara, pemimpin, warga negara asing, aparat negara. (wawancara 20 Juni 2018)

Jawaban dari siswa inisial E.M : identitas nasional adalah identitas warga negara di negara tersebut seperti sejarah dan hal-hal yang khas yang hanya ada di negara tersebut. (wawancara 20 Juni 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa siswa di SMA Negeri 1 Langowan dalam hal pengetahuan tentang identitas nasional masih ada sebagian siswa yang tidak paham tentang identitas nasional.

4. Apakah anda selalu berbuat baik kepada orang lain ?

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa siswa di SMA Negeri 1 Langowan diperoleh jawaban sebagai berikut:

Jawaban dari siswa inisial M.R : Ya. Karena berbuat baik itu kewajiban kita berbuat baik kepada orang agar bisa disenangi orang dan tidak dijauhi orang. (wawancara 20 Juni 2018)

Jawaban dari siswa inisial K.O : saya selalu melakukan hal baik dalam hal pergaulan saling menegur teman agar supaya melakukan hal baik, sering membantu dan saling melengkapi. (wawancara 20 Juni 2018)

Jawaban dari siswa inisial C.M : saya sering berbuat baik tapi juga terkadang tidak maksudnya dalam hal ulangan itu lain dan kalau berbagi tugas mungkin boleh mokase pa teman. (wawancara 20 Juni 2018)

Jawaban dari siswa inisial A.M : untuk saat ini saya merasa sering melakukan hal baik karena prinsip saya itu berbuat baik sebelum waktunya habis. (wawancara 20 Juni 2018)

Jawaban dari siswa inisial V.K : kadang-kadang saya berbuat baik, lain kali dorang baik kita baik dan kalau dorang tidak baik kita juga tidak baik. (wawancara 20 Juni 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa siswa di SMA Negeri 1 Langowan dalam hal berbuat baik mereka sering lakukan seperti membantu sesama teman.

Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara yang dilakukan kepada guru mata pelajaran PKn dan beberapa siswa yang ada di SMA Negeri 1 Langowan mengenai upaya Guru dalam meningkatkan civic knowledge siswa maka pada bagia ini akan di bahas berdasarkan indikator indikator yang yang diteliti yakni upaya guru dan civic knowledge siswa. Adapaun pembahasannya sebagai berikut :

Upaya Guru.

Upaya guru merupakan suatu usaha yang harus dilakukan oleh guru agar siswa itu menjadi pribadi yang disiplin. Hasbullah (2006:121).

Dalam (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008:626) kata upaya berarti usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya).

Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan. Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode dan alat penunjang yang lain.

Sedangkan menurut Rosmiati (2010:17), “upaya guru adalah usaha untuk melakukan sesuatu hal atau kegiatan yang bertujuan, yaitu kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Berdasarkan pemikiran di atas, apabila mengkaji sesuai data hasil analisis dilapangan, di mana di SMA negeri 1 Langowan peneliti menemukan bahwa Guru telah melaksanakan tugasnya dengan baik hal itu dibuktikan dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Guru PKn yang mana Guru PKn selalu memberikan pemahaman tentang kewarganegaraan kepada siswa agar menjadi warga negara yang baik, selain itu juga guru di SMA Negeri 1 Langowan dalam melaksanakan pembelajaran selalu menggunakan RPP sebagai pedoman dalam pembelajaran.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa menjadi seorang guru harus terus melaksanakan tugasnya dengan baik agar supaya tujuan pembelajaran bisa di capai dengan baik dan mampu menciptakan peserta didik yang akan menjadi warga negara yang baik.

Civic Knowledge Siswa

Komponen utama pendidikan kewarganegaraan yang perlu diajarkan kepada peserta didik mencakup tiga kompetensi kewarganegaraan yaitu pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), ketrampilan/kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*), sikap atau watak (*civic disposition*). Branson, 1998, 1999).

Pembagian atas ketiga domain ini jika dikaitkan dengan model Benjamin S. Bloom dalam (Yulaiwati, 2004) maka akan tampak kesejajarannya dengan tiga ranah; kognitif, psikomotor, afektif. Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) bisa di seajarkan dengan ranah kognitif, ketrampilan kewarganegaraan (*civic skills*) bisa diseajarkan dengan ranah psikomotor, sedangkan sikap/watak kewarganegaraan (*civic disposition*) bisa diseajarkan dengan ranah afektif. (Winarn *Civic knowledge* atau pengetahuan kewarganegaraan berkaitan dengan kandungan atau isi apa saja yang seharusnya diketahui oleh warga negara. *Civic knowledge* berkenaan dengan apa-apa yang perlu diketahui dan dipahami secara layak oleh warga negara.

National center for learning and citizenship (NCLC) menyatakan, *civic knowledge* berisikan item-item pertanyaan yang berkaitan dengan sejarah dan pengetahuan kontemporer, seperti pemahaman tentang dan mekanisme pemerintahan konstitusional dan prinsip-prinsip yang melandasinya. (Winarno, 2012:107)

Berdasarkan pemikiran di atas, apabila mengkaji sesuai data hasil analisis di lapangan, di mana *civic knowledge* atau pemahaman kewarganegaraan siswa di SMA Negeri 1 Langowan sudah baik namun masih ada sebagian kecil siswa yang belum paham tentang *civic knowledge*. Hal itu ditunjukkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada para informan yaitu siswa, sebagian siswa belum paham tentang identitas nasional yang mana identitas nasional merupakan bagian terpenting dalam memahami *civic knowledge*.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Upaya Guru dalam Meningkatkan *Civic Knowledge* Siswa pada Mata Pelajaran PKn di SMA N 1 Langowan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya Guru Menyusun Konsep Materi ajar PKn untuk Meningkatkan *Civic Knowledge* siswa sesuai dengan standar profesional yang telah ditentukan berdasarkan aspek-aspek pokok yang menjadi tolak ukur penting dalam meningkatkan *Civic Knowledge* (Pengetahuan Kewarganegaraan) siswa. Kriteria pokok pemilihan materi ajar PKn dikembangkan oleh guru melalui langkah-langkah yang sesuai dengan indikator yang ditentukan diantaranya adalah mengidentifikasi berbagai aspek yang terkandung dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai, mengidentifikasi jenis materi ajar yang merupakan implikasi dari keberagaman materi ajar meliputi ranah kognitif, afektif dan psikomotorik, menentukan sumber dan media pendukung terhadap keberhasilan penyampaian materi pembelajaran serta menyesuaikan materi ajar dengan kebutuhan, potensi dan perkembangan peserta didik.
2. Upaya Guru dalam Meningkatkan *Civic Knowledge* Siswa pada Mata Pelajaran PKn yang disusun oleh guru terhadap ranah kognitif, afektif dan psikomotorik telah sesuai. Persentase penerapan ranah kognitif, afektif dan psikomotorik dari keseluruhan materi ajar PKn dimana guru menempatkan pengaplikasian ranah kognitif sebanyak 25 %, ranah afektif 25 % dan ranah psikomotorik sebanyak 50 %, dengan pertimbangan pentingnya aplikasi dari teori PKn dan sikap yang terpuji sehingga muncul harapan peserta didik tidak hanya cerdas dalam berpengetahuan tetapi juga cerdas dalam bersikap dan bertingkah laku.
3. Kendala yang dihadapi guru dalam meningkatkan *civic knowledge* siswa pada mata pelajaran PKn diantaranya adalah kerumitan penyesuaian alokasi waktu dengan banyaknya konsep materi ajar yang perlu dipahami peserta didik, kerumitan penyusunan materi ajar yang sesuai dengan struktur keilmuan, penyesuaian materi ajar terhadap karakter peserta didik yang berbeda-beda, serta kurang maksimalnya guru dalam mengeksplor sumber materi ajar berupa internet, jurnal maupun laporan penelitian.

Saran

Adapun saran dari hasil penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Dalam penyajian materi ajar guru harus lebih menitikberatkan pada substansi materi ajar yang lebih mudah dipahami peserta didik dan tidak berfokus hanya pada buku teks saja. Selain itu, guru harus berupaya untuk memanfaatkan teknologi dan informasi dalam menemukan sumber materi ajar yang tepat untuk menyusun dan mengembangkan materi ajar dengan baik, memperluas wawasan dengan mengikuti pelatihan berbasis IT, sehingga sumber-sumber materi yang relevan dengan materi ajar dapat lebih mudah diakses melalui teknologi internet.
2. Pemerintah lebih meningkatkan frekuensi pendidikan dan pelatihan bagi guru untuk meningkatkan kompetensi profesional utamanya dalam bidang teknologi dan informasi, sehingga guru dapat lebih mengeksplorasi potensinya melalui sumber-sumber keilmuan yang lebih *fresh* dan *update* dalam menyusun dan mengembangkan materi ajar.
3. Pihak sekolah sebaiknya lebih memperhatikan mutu dan kualitas sarana dan prasana yang mendukung dalam proses penyajian materi ajar, misalnya saja pengadaan literatur lengkap di perpustakaan, sehingga siswa dan guru dapat mengakses buku, artikel, jurnal maupun laporan penelitian terkini yang relevan dengan materi ajar berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Maman, dkk.2011. *Dasar-Dasar Metode Statistika*. Bandung: Pustaka Setia. Busrizalti, H.M, 2013 *Pendidikan Kewarganegaraan, Negara Kesatuan, HAM, Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Yogyakarta: Total Media.
- Daryono, dkk.2011. *Pengantar Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Djamarah, Syaifull Bahri Dan Aswan Zain. 2010. *Strategi Belajar Mengajar*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hasbullah, 2006. *Otonomi Pendidikann*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Hamidi, Jazim 2010. *Civic Education. Antara Realitas Politik Dan Implementasi Hukumnya*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia* 2011. Edisi Ketiga, Pustaka Bahasa Depdiknas, Jakarta: Balai Pustaka.
- Nanawi, Hadari dan Martini. 1992. *Intrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada.
- Sugiyono.2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sumarsono, 2011. *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional. 1991. *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Yessy Nur Endah Sary, 2015. *Evaluasi Pendidikan*, Jogyakarta: Deepublish.
- Winarno, 2014. *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Bumi Aksara.

Referensi Undang-Undang

- Permendikbud No. 20 tahun 2016 *Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Dan Menengah*
- Permendikbud No. 21 tahun 2016 *Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Dan Menengah*
- Permendiknas No.16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005 *Tentang Guru Dan Dosen*.
- Undang-undang RI No. 20 Tahun 2005 *Tentang Sistem Pendidikann Nasional*.

Referensi Internet

- <http://www.civiced.org/margaretbranson1998> (yang diakses 2 oktober 2017).
- <http://nurulhaj19.com> (yang diakses 2 oktober 2017).